

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Ibid.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 47.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2018.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

B. Jurnal Dan Artikel Ilmiah

Ahmad Sofian, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2017.

Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.

Fitri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Dwi Fuji Lestari, Inzira Fauzia Novia Sari, M. Nur Ramdhan, Saparudin Saroni, Rangga Jayanuarto, dan Linda Safitra, "Meningkatkan Pengetahuan dan Kepedulian Hukum Melalui UU Perlindungan Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak pada Masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kabupaten Lebong", *JIMAKUKERTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, 2022.

Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 1, Juni 2025.

Hadi Supeno, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016.

Eko Soponyono, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 3, 2013.

Mahrus Ali, "Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 210.

M. Nasser, "Kedudukan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, "Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 96.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I dan Pasal 88.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 ayat (3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2.

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 3.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

D. Sumber Lainnya

Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Manna Tahun 2025.

Hasil Wawancara dengan Selvi Rahmadani, Penyidik Unit PPA Polres Manna, 31 Maret 2026.

Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Mna.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Pengambilan data di Unit PPA Polres Manna



Lampiran 2. Wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Manna